

Judul : Agus Rahardjo Dituding: KPK Pertanyakan Relevansi Tugas Pansus
Tanggal : Sabtu, 23 September 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 20

► AGUS RAHARDJO DITUDING

KPK Pertanyakan Relevansi Tugas Pansus

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan relevansi antara panitia khusus hak angket dan tudingan Agus Rahardjo terkait dengan korupsi pengadaan KTP elektronik.

M.G. Noviarizal Fernandez
& Lingga S. Wiangga
redaksi@bisnis.com

"Fakta-fakta persidangan yang sudah dipaparkan sangat jelas menunjukkan bahwa LKPP yang dipimpin Pak Agus saat itu merekomendasikan agar lelang e-KTP tidak digabungkan," ujar Febri Diansyah, juru bicara KPK, Jumat (22/9).

Dia menambahkan, kalau saja waktu itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau terdakwa Irman dan Sugiharto mengikuti hal itu tentu tidak akan terjadi seperti saat ini.

Menurutnya, KPK memiliki sejarah panjang terkait dengan tudingan miring terhadap pimpinan ketika sedang menangani kasus besar. Oleh karena itu, dia merasa tidak kaget dengan tudingan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo tersebut.

Dia mengatakan, tentu saja tudingan yang dialamatkan kepada Pimpinan KPK tersebut tidak benar dan publik harus bisa membedakan antara kewenangan LKPP dan pengadaan paket pengerjaan. Kedua hal

► KPK memiliki sejarah panjang terkait dengan tudingan miring terhadap pimpinan ketika sedang menangani kasus besar.

► KPK merasa janggal lantaran tudingan ini dimunculkan oleh beberapa anggota panitia khusus.

tersebut berbeda.

"Kalau pun ada persoalan masa lalu, kita tahu persis pemilihan Pimpinan KPK baik di pansel yang dibentuk Presiden kemudian dibawa Komisi III DPR, prosesnya sangat ketat karena melibatkan banyak institusi saat itu termasuk juga Kepolisian, BIN, KPK dan PPATK," ujar Febri.

Dia menjelaskan, KPK merasa janggal lantaran tudingan ini dimunculkan oleh beberapa anggota panitia khusus. Pasalnya, jika hak angket bisa memproses KPK sebagai objeknya, tentu saja harus berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

"Persoalan-persoalan masa lalu kalau pun benar, apakah itu termasuk objek atau ruang lingkup pansus tentu ini pertanyaan serius."

Akan tetapi, sambungnya, KPK tidak akan terlalu menghabiskan sumber daya dan energi untuk memikirkan hal itu, karena lembaga sadar betul sekarang banyak kasus besar yang harus dihadapi.

"Energi KPK akan lebih fokus menangani kasus besar tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Arteria Dahlan, anggota panitia khusus mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan perihal dugaan Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut pansus, Agus dikategorikan melawan hukum saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Perbuatan yang dimaksudkan oleh anggota DPR tersebut yakni pengadaan barang dan jasa pada Dinas Binamarga terkait pengadaan 19 unit barang bernama Pakkat Road Maintenance Crane Truck (PRMCT) C3200 yang dilakukan pada 2015.

HAK ANGKET

Pada perkembangan lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan tidak khawatir jika masalah Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK diguna-

kan lawan politiknya untuk merusak elektabilitas partai berlambang beringin itu dan Presiden Joko Widodo pada tahun politik 2018-2019.

Seperti diketahui, Golkar dan partai pendukung pemerintah di parlemen saat ini menjadi penggerak Pansus tersebut.

Adapun keberadaan Pansus, dianggap sebagai jalan menggembosi KPK yang getol memberantas korupsi.

Apalagi, keberadaan Pansus disinyalir sebagai 'akal-akalan' anggota dewan, karena lembaga antirasuah tersebut sedang mengusut kasus korupsi KTP berbasis elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dengan tersangka utama Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto.

Di sisi lain, Golkar sudah mengikat kesepakatan untuk menyokong Presiden Joko Widodo pada pemilu presiden 2019.

"Hak angket ini hak DPR yang diatur UU. Kami ingin Pansus ini berorientasi pada tata kelola KPK sehingga menjamin kerja secara profesional dan lebih efektif. Partai Golkar menolak pembubaran KPK, sehingga saya yakin elektabilitas kami dan Pak Joko Widodo tidak terganggu," katanya, Jumat (22/9).

Dia menambahkan, Pansus yang didukung partainya hadir untuk menguatkan KPK. "Sikap kami jelas kalau pembubaran kami tidak setuju. Sikap kami tidak abu-abu. Rusak negara kita kalau begitu," tegasnya. □